

**URGENSI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF**

FIQH SIYĀSAH

SKRIPSI

Oleh

Mochammad Rizky Eka Aditya

NIM. 05020421044



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah*)
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Rizky Eka Aditya
NIM : 05020421044
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tatanegara (Siyasah)
Judul : Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah
di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, // November 2024

Saya yang menyatakan,



Mochammad Rizky Eka Aditya

NIM. 05020421044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

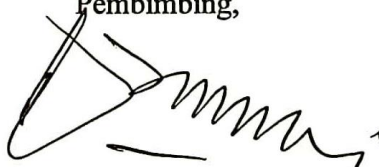
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mochammad Rizky Eka Aditya
NIM. : 05020421044
Judul : Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perspektif
Fiqh Siyāsah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 11 November 2024

Pembimbing,



Dr. Lutfil Ansori, S.H.I., M.H.

NIP. 198311132015031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

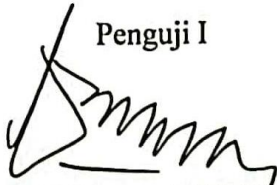
Nama : Mochammad Rizky Eka Aditya

NIM. : 05020421044

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Lutfil Ansori, S.H.I., M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji II



Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Achmad Safudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 5 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300E-Mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Rizky Eka Aditya.....
NIM : 05020421044.....
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara (*Siyāṣah*).....
E-mail address : rizkyismailiyah1@gmail.com.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perspektif *Fiqh Siyāṣah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Desember 2024

Penulis

(Mochammad Rizky Eka Aditya)

ABSTRAK

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebuah proses penyesuaian antar peraturan yang merujuk pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis agar sebuah peraturan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih. Apabila mengacu peraturan perundang-undangan yang ada terdapat dua kementerian yang berwenang melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Masing-masing kementerian tersebut memiliki peraturan yang mengatur tentang harmonisasi rancangan peraturan daerah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap siapa yang melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah. Maka isu tersebut menarik apabila dilakukan pengkajian lebih mendalam. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: (i) Bagaimana konsep harmonisasi rancangan peraturan daerah di Kementerian Hukum dan HAM? (ii) Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap urgensi harmonisasi rancangan peraturan daerah di Kementerian Hukum dan HAM?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggambarkan proses untuk menemukan prinsip, aturan, dan doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum serta untuk menemukan kebenaran koherensi. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan topik penelitian serta untuk bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep dari harmonisasi rancangan peraturan daerah adalah untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah yang disusun telah selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan baik yang lebih tinggi maupun yang setingkat/setara, serta telah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam kajian *fiqh siyāsah* urgensi pengharmonisasian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cenderung mendatangkan kemashlahatan. Hal tersebut dikarenakan pengharmonisasian yang dilakukan dimaksudkan agar terjadinya kemashlahatan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah sebagaimana kaidah *jalb al-māṣālih wa daf'ul mafāsīd* serta menganut asas legislasi Islam yakni bersandar pada hirarki peraturan di atasnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka diperlukan membentuk kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undang serta melakukan revisi atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakomodir harmonisasi rancangan peraturan daerah.

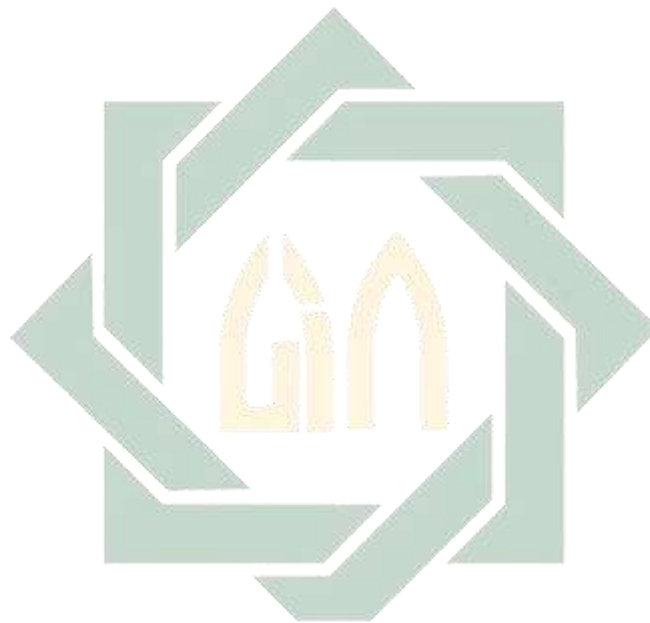
DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
F. Penelitian Terdahulu	17
G. Definisi Operasional.....	19
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TEORI <i>FIQH SIYĀSAH</i> DAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27
A. Teori <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i>	27
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i>	27
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i>	29
3. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i>	30
B. <i>Siyāsah Tashri'yyah</i> dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan	40
C. Konsep <i>Wizāroh</i> dalam <i>Fiqh Siyāsah</i>	51
D. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	53

1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	53
2. Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia	58
BAB III BENTUK HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI INDONESIA.....	65
A. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	65
1. Regulasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.....	65
2. Praktik Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah	74
B. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah di Kementerian Dalam Negeri.....	76
1. Regulasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.....	76
2. Praktik Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah	81
C. Analisis Yuridis Terhadap Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah di Indonesia	84
BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYÁSÁH</i> TERHADAP PENYELARASAN DAN LEMBAGA PELAKSANA HARMONISASI	96
A. Aspek Penting dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.....	96
1. Urgensi Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah	96
2. Lembaga Pelaksana Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah	104
B. Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	110
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN.....	130

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Rekapitulasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.....	75
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tugas dan Fungsi Kementerian.....	84
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Revisi. Cet.7. Jakarta: Prenada Group, 2018.
- . *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. 1st ed. Cet.4. Jakarta: Kencana, 2011.
- Alam, Moch. Ade Syukur Nur. “Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Di Kementerian Dalam Negeri.” Data Pendukung, October 21, 2024.
- Almubarak, Fauzi. “Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *Journal Istighna* 1, no. 2 (July 25, 2018): 115–143. Accessed July 14, 2024. <http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna/article/view/6>.
- Ansori, Lutfil. *Legal Drafting*. 1st ed. Cet.1. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Arisnu, Moro. “Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.” Data Pendukung, October 16, 2024.
- Aritonang, Ririn Agustin. “Harmonisasi Peraturan Daerah Guna Meminimalisir Konflik Norma.” *Hangoluan Law Review* 2, no. 1 (May 2023). Accessed April 29, 2024. <https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/20>.
- Ashiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Assiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aulia, Nabiella. “Analisis Fikih Siyasah Terhadap Harmonisasi Legislasi Hukum Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021. Accessed July 15, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58191/1/NABIELLA%20AULIA%20-%20FSH.pdf>.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.
- Cerdas, Felani Ahmad, Ali Abdurahman, and Indra Perwira. “Harmonisasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4, no. 1 (July 26, 2022): 40–53. Accessed April 30, 2024. <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/149>.
- Dahlia. “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam

- Negeri Raden Intan, 2020. Accessed June 26, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/12000/1/SKRIPSI%20BAB%201%262.pdf>.
- Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (April 1, 2017). Accessed June 27, 2024. <http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/59>.
- Fatmawati, and Nur Alimah. *Fikih Siyasa*. Makassar: Pustaka Almaida, 2014.
- Hakim, Lutfi Lukman, and Fachri Fachrudin. "Taqnīn Al-Ahkām Dalam Lintas Sejarah." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 9 (2017). Accessed November 2, 2024. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/188>.
- Hariyanto, Eko. "Harmonisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Suatu Peraturan Daerah." *Ensiklopedia of Journal: Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 4, no. 2 (2022). Accessed April 30, 2024. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/education/article/view/1722>.
- Ibnu Taimiyah. *Majmu'atul Fatawa: Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dan Kekuasaan, Siyasa Syar'iyah, Dan Jihad Fi Sbilillah*. Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Ikhwan, Yeni Nel, and Khairani Khairani. "Kerangka Hukum Harmonisasi Peraturan Daerah Dalam Perspektif Teori Hirarki Perundang-Undangan." *Nagari Law Review* 7, no. 2 (February 1, 2024): 401. Accessed April 30, 2024. <http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/651>.
- Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariah Islam*. Cet.8. Bekasi: PT. Darul Falah, 2017.
- . *Qawanin Al-Wizarah Wa Siyasa al-Mulk*. Beirut: Dar al-Thali'ah al-Thaba'ah, 1979.
- Izomiddin. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Jaelani, Jejen. "Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Jannah, Ana Rodhatul. "Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)." Skripsi, Universitas

- Islam Negeri Raden Intan, 2023. Accessed June 25, 2024. <http://repository.radenintan.ac.id/23202/1/COVER%20BAB%201%20BAB%202%20DAPUS.pdf>.
- Kasmad, Ratni. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (December 29, 2021): 26–37. Accessed October 27, 2024. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/1714>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Tahun 2011," 2023. Accessed June 26, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Khafidhin, Rama Nidya. "Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Pasca Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019." Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2022.
- Khalil, Rasyid Hasan. *Tarikh Tasyri: Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Ke-3. Jakarta: Grafika Offset, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- . *Khulashah Tarikh Tasyri'al-Islamiy*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1968.
- Leonardo, Bhakti Purnama, Muhammad Iqbal, and Nando Yussele Mardika. "Mekanisme Harmonisasi Peraturan Daerah Pasca Hilangnya Kewenangan Executive Review Pemerintah Pusat." *Puskapsi Law Review* 1, no. 2 (December 30, 2021): 104. Accessed April 30, 2024. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PUSKAPSI/article/view/27798>.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah: Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Mahendra, A.A. Oka. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan," 2010. Accessed August 10, 2024. <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet.17. Jakarta: Kencana, 2022.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negari*. Jakarta, 2021. Accessed October 9, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/175745/permendagri-no-13-tahun-2021>.
- . *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Jakarta, 2015. Accessed April 30,

2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164459/permendagri-no-80-tahun-2015>.

———. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Jakarta, 2018. Accessed April 30, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240988/permendagri-no-120-tahun-2018>.

———. Surat Nomor 180/7182/SJ. “Permohonan Pencabutan Atas Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 Dan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018.” Surat Nomor 180/7182/SJ, September 19, 2018. Accessed May 8, 2024. <https://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/files/Surat%20Permohonan%20pencabutan%20permenkumham.pdf>.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta, 2018. Accessed April 30, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133162/permenkumham-no-22-tahun-2018>.

———. *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta, 2023. Accessed September 1, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/272052/permenkumham-no-28-tahun-2023>.

Moh. Mahfud MD. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

———. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Muhammad Alim. “Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Media Hukum* 17, no. 1 (June 2010). Accessed May 20, 2024. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/373>.

Muhammad Baqir Ash-Shadr. *Iqtishaduna, Terj. Yudi, Buku Induk Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra, 2008.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2014.

- Nugroho, Setio Sapto. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*. Jakarta: Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, 2009.
- Pokja Penyusunan DPHN 2016-Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta, 2014. Accessed May 5, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41581/perpres-no-87-tahun-2014>.
- . *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta, 2023. Accessed September 1, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/243747/perpres-no-18-tahun-2023>.
- . *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri*. Jakarta, 2021. Accessed October 9, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/175745/permendagri-no-13-tahun-2021>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta, 2011. Accessed April 30, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta, 2022. Accessed April 30, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta, 2019. Accessed April 30, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/121716/uu-no-15-tahun-2019>.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Cet.1. Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012.

- Saebani. *Fiqh Siyasa Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sandi, Jhon Retei Alfri, and Bismar Harris Satriawan. "Telaah Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 9, no. 2 (February 2024). Accessed April 30, 2024. <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/3652>.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Cet.1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Soegiyono. *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Kebijakan Hukum Kedirgantaraan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kasinus, 2007.
- Suharti. "Al-Siyasah al-Syar'iyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (December 2, 2015). Accessed July 7, 2024. <https://www.e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/9>.
- Sukardja, Ahmad, and S. Mujar Ibnu. *Tiga Kategori Hukum Syariat: Fikih Dan Qanun*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suntana, Ija. *Pemikiran Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Mandiri Press, 2010.
- Syarifudin, Amir. *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Talafah, Muhammad Mahmud. "Kaidah Tasharruf al Imam Fi Al-Ra'iyah Manuthun Bi al-Mashlahah Dan Kaitannya Dengan Fikih Dan Qanun Dalam Masa Kontemporer." Disertasi, Universitas Yarmou, 2008.
- Waldron, Jeremy. "Separation of Powers or Division of Power?" *SSRN Electronic Journal* (2012). Accessed May 1, 2024. <http://www.ssrn.com/abstract=2045638>.
- Yasonna H. Laoly. "Konstelasi Politik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Makalah presented at the Penutupan Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta, October 6, 2016.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.